BMKG BERI CONTOH DIY

Hadapi Megathrust, Siapkan Tata Ruang Aman

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati meminta Pemerintah Daerah (Pemda) agar menyiapkan tata ruang yang aman dan mampu menampung masyarakat sebagai upaya mitigasi bila gempa megathrust terjadi di Indonesia.

"Bagaimana menyiapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang mengakibatkan tsunami. Pemda itu sudah diajak bersama-sama menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan sistemnya, adakah jalur evakuasinya, adakah tempat shelter evakuasi," kata Dwikorita Karnawati di Jakarta kemarin.

Kemudian, lanjutnya, zona-zona rawan seperti daerah dekat laut dan pantai agar dikosongkan dan tidak didirikan banyak bangunan.

"Pemda-pemda diharapkan juga menyiapkan tata ruang di sana. Di pantai itu dibatasi, jangan dibangun bangunan-bangunan. Kalau sampai dibangun hotel, hotelnya harus siap menghadapi (megathrust), diwajibkan bangunannya mampu tahan 8,5 Magnitudo," katanya.

Dwikorita Karnawati mencontohkan Pemda DIY merupakan salah satu Pemda yang telah menyiapkan tata ruang yang aman menghadapi potensi gempa megathrust lewat pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulonprogo. "Yogyakarta International Airport (YIA) itu sudah disiapkan untuk menghadapi megathrust. Jadi dibangun Insya Allah desainnya dirancang tahan gempa 8,5 Magnitudo, itu megathrust dan elevasinya lebih tinggi dari elevasi tsunami. Jadi kalau sedang berada di Bandara YIA, kalau ada gempa, ada tsunami, jangan keluar gedung. Tempat paling aman di situ, lari ke Lantai Mezzanine dan Lantai 2 dan ada Crisis Center untuk masyarakat mampu menampung 2.000 orang, bandaranya itu menampung 10.000 orang," katanya. **(Ant/San)-f**

TNI/Polri

Sambungan hal 1

"Saya kemarin ketemu Bapak Panglima, Bapak Kapolri dan Jaksa Agung. Saya sampaikan pesan, TNI Polri saat pilkada serentak semua dibagi habis kekuatannya. Kemudian anggaran di daerah juga sudah diserahkan untuk aspek pengamanan TNI dan Polri," ungkapnya

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi, Pemda DIY telah mengambil beberapa langkah strategis. Di antaranya, pemberian Bantuan Keuangan Parpol pada bulan Februari dan November 2024 serta perekaman e-KTP bagi pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri.

Pihaknya juga telah melakukan pemetaan wilayah rawan konflik, pembinaan ormas, pendidikan politik serta mengeluarkan edaran mengenai netralitas ASN.

"Kami juga telah mengoptimalkan aplikasi SRIKRESNO, membentuk tim pemantauan dan membuka layanan aduan untuk memastikan pemilu berjalan aman dan lancar," terangnya

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat dimintai komentar soal hasil rapat Baleg DPR RI, yang menyepakati revisi UU Pilkada. Baleg mengabaikan putusan MK No 60 yang diketuk MK Selasa lalu, tidak mau banyak komentar. "Kalau soal itu tidak ada komentar, saya juga belum mengikuti putusan Baleg," ujar Afifuddin.

Saat disinggung apakah PKPU akan menggunakan putusan MK atau kesepakatan dari Baleg, Afifuddin juga tak mau menanggapi. **(Ria)-f**

Anugerah

Sambungan hal 1

meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap cabang seni sastra, memberikan edukasi dan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat menikmati hasil karya sastra kontemporer.

Penyusun Materi Buku, Latief S Nugraha mengungkapkan, Buku Antologi Cerpen Tutur Tumurun berisikan cerpen yang dihasilkan dari penelitian dan riset, setelah menelisik berbagai kisah banyak hal di Yogyakarta ternyata memiliki folklor beragam yang merupakan bagian dari kekayaan DIY.

"Diharapkan dengan adanya buku ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat DIY," ungkapnya.

Kepala TBY, Purwiati mengungkapkan, cerpen-cerpen dalam antologi ini tidak hanya mengambil folklor sebagai sumber cerita, melainkan sebagai sumber perspektif yang menarik dengan gaya cerita mengikuti perkembangan zaman.

"Harapannya dengan diterbitkannya Buku Antologi Cerpen Tutur Tumurun menjadi bagian penting pencatatan aktivitas seni budaya yang terus digali, dan dengan munculnya penulis muda berbakat akan menambah khasanah dunia sastra lebih hidup," ungkap Purwiati.

Purwiati menjelaskan, Program Selebrasi Sastra Seni Budaya TBY sudah melalui berbagai rangkaian Program Bincang Cipta Cerpen, Sayembara Cipta Cerpen, Penerbitan Buku Antologi Cerpen, dan Pesta Ceria sebagai puncak acara. Kegiatan Sayembara Cipta Cerpen mempunyai aspek bagi seniman sastra untuk melahirkan karya yang menginspirasi dan memberikan nilai edukasi bagi masyarakat.

Acara tersebut juga menjadi ajang penganugerahan kepada lima pemenang Sayembara Penulisan Cerpen Tutur Tumurun 2024 yang diikuti 70 orang. "Dari 70 cerpen yang diterima, telah dilakukan penjurian oleh Naomi Srikandi (penulis, aktor, sutradara teater), Joni Ariadinata (sastrawan), dan Satmoko Budi Santoso (sastrawan). Dalam sayembara ini didapatkan 5 Cerpen Terbaik dan 15 Cerpen Pilihan yang akan diterbitkan dalam Buku Antologi Cerpen Tutur Tumurun: Sayembara Cipta Cerpen Taman Budaya Yogyakarta 2024," jelasnya.

Joni Ariadinata menyampaikan, lomba ini sangat menarik karena cerita berasal dari sumber lokal yang ada di Yogyakarta dan lomba cerpen dengan menggali kebudayaan asli dan nilai-nilai yang terkandung seperti ini sangat jarang.

"Sayembara Cipta Cerpen ini patut untuk diteruskan karena seluruh peradaban yang berkembang saat ini seluruhnya mempunyai akar, jadi negara-negara yang menghargai akar tersebut menjadi negara yang kuat," ujarnya.

Pemenang Sayembara Cipta Cerpen, Dhimas Bima Shofyanto menambahkan, sayembara ini sangat bagus karena yang diangkat adalah folklor, ini merupakan sebuah tantangan baru. "Dengan lomba ini, saya berharap folklor yang ada di Yogyakarta lebih diangkat lagi, dan bisa dijadikan pembelajaran karena pasti ada pesan yang terkandung," pungkasnya.

Acara ini juga disemarakkan pembacaan cerpen karya salah satu pemenang sayembara oleh Landung Simatupang feat Bagus Mazasupa, pertunjukan Tari Angguk oleh Sanggar Sotya Manunggal, dan pergelaran musik oleh Rubah di Selatan, Kopibasi, serta Jejak Imaji. **(*-1)-f**

Bahlil

Sambungan hal 1

Walaupun begitu, ia tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi bisa saja menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar seperti yang diisukan sebelumnya. Karena menurutnya, di negara demokrasi ini siapa saja berhak untuk berdoa.

"Kalau doanya diijabah Allah, kalau jadi, *ah paten barang itu kan*," ucap Bahlil.

Di samping itu, ia membantah adanya anggapan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena intervensi dari pemerintah. Sebab, ia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah. "Jadi jangan selalu dianggap semua inisiatif pemerintah, tidak benar itu," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029 setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I dan II menyampaikan dukungannya.

"Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir pada Munas XI setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029?" tanya Ketua Pimpinan Sidang Munas XI Partai Golkar Adies Kadir.

Sebelumnya Bahlil telah disepakati untuk menjadi calon tunggal ketua umum atau ketua formatur. Ia telah lolos tahap pendaftaran dan menyisihkan Ridwan Hisjam yang tidak lolos dalam tahap itu.

Sekretaris Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) UII Dr Despan Hermansyah menyatakan, terpilihnya Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto kian menegaskan kultur hubungan antara kekuasaan dan parpol masih dipengaruhi langgam loyalitas insentif dan loyalitas berbasis penyanderaan. Hal ini tentu tidak sehat, mengingat parpol menjadi salah satu elemen utama demokrasi. "Oleh karena itu, Presiden RI hendaknya menahan diri untuk tidak meneruskan intervensi terhadap parpol khususnya Golkar," tandas Despan. **(Fsy/Ant)-d**

Adab

Sambungan hal 1

Insiden konyol yang pertama adalah ketika panitia memperkenalkan delegasi Korea Selatan yang berada di atas perahu di Sungai Sein dengan menyebut mereka sebagai delegasi Republik Demokratik Rakyat Korea alias Korea Utara. Pengumuman yang didengar secara langsung oleh lebih dari tiga ratus ribu penonton di tengah Kota Paris dan disaksikan oleh penonton daring sebanyak 28 juta lebih di seluruh dunia itu langsung memunculkan kekecewaan. Mengapa negara sekelas Prancis yang demokrasinya lebih tua daripada Amerika bisa terpeleset lidah seperti itu. Kontan secara langsung Presiden Olympic, Thomas Bach menghubungi Presiden Korea Selatan untuk meminta maaf. Sulit dibayangkan bagaimana perasaan Presiden Yoon Seuk-yeol menghadapi kenyataan seperti ini.

Insiden berikutnya adalah ketika salah satu pertunjukan iring-iringan yang menampilkan mirip dengan setting dalam lukisan 'Jamuan Terakhir' karya Leonardo Davinci, karena ditampilkan oleh para penari gay yang dianggap melecehkan umat Nasrani di seluruh dunia. Tanpa narasi yang cukup performance itu memang mudah menimbulkan kesan parodi murahan yang tak pantas dilakukan oleh Prancis yang sangat tinggi selera seninya itu. Protes dari 2,4 miliar umat Nasrani menggema di seluruh dunia, sehingga salah satu sponsor dari Amerika (Tech) mencabut iklannya dan membatalkan kesepakatan sponsorshipnya.

Mengenai salah sebut delegasi bukanlah merupakan yang pertama kali terjadi di Olimpiade. Pada Olimpiade London 2012, seorang pegulat Korea Utara justru (sebaliknya) diperkenalkan sebagai atlet Korea Selatan. Kontan saja sang atlet ngambeg mogok bertanding dan mengajukan protes keras. Di kesempatan lain pernah terjadi, atlet bela diri Indonesia yang memenangkan juara satu tidak mau naik panggung kejuaraan karena panitia memasang Merah Putih secara terbalik.

Hal ini menunjukkan bahwa pesta olahraga, apalagi sekelas Olimpiade, yang merupakan event multikultural yang seharusnya mengedepankan perilaku saling memahami dan menghargai perbedaan, tidak sepenuhnya dipahami oleh panitia penyelenggara. Mungkin saja karena motto Olimpiade saat ini adalah Citius, Altius, Fortius (lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat), yang mengutamakan hasil daripada proses.

Rangkaian 'pertunjukan' yang disutradarai oleh Thomas Jolly (kelahiran tahun 1982), yang sekaligus pemilik rumah produksi La Piccola Familia(2006), dengan biaya 8,7 dollar Amerika itu mestinya dilengkapi oleh para seniman filsuf sehingga mampu mengantisipasi insiden tersebut.

(Penulis adalah Guru Besar (Emeritus) Diplomasi Kebudayaan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)-d

Polisi Janji Tuntaskan Kasus Firli Bahuri

JAKARTA (KR) - Polisi memastikan tidak akan menjadikan eks Ketua KPK Firli Bahuri menjadi tersangka seumur hidup atau statusnya menggantung sebagai tersangka. Polisi juga berjani akan menuntaskan penyidikan perkara aquo. "Kami janji tuntas menuntaskan penyidikan perkara aquo," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (21/8).

Menurutnya, kasus yang terjadi bakal diusut tuntas, termasuk pertemuan Firli dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah GOR Badminton di kawasan Jakarta Barat. "Sekali lagi kami sampaikan bahwa penyidikan dalam dua perkara aquo atau dua laporan polisi dimaksud akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas," ungkapnya.

Saat dikonfirmasi soal pelimpahan berkas tersebut, Ade Safri menjelaskan bakal menyampaikan ke publik apabila berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21. "Penyidikan masih terus berlangsung, nanti ada update akan kita sampaikan," katanya. **(Ant/Has)-d**

Muncul

Sambungan hal 1

Sementara itu, Putusan MK No 70/PUU-XXII/2024 menegaskan, secara historis, sistematis, praktik dan perbandingan dengan pemilihan lain, syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan pasangan calon terpilih.

Dalam pernyataan sikap yang sama, CALS juga mendesak elite-elite politik untuk tidak mengakali aturan main pilkada, khususnya dengan cara-cara mempersempit ruang untuk berkompetisi, menutup pencalonan kandidat-kandidat alternatif dan memborong dukungan sampai akhirnya terbentuk koalisi yang gemuk.

Oleh karena itu, CALS juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menindaklanjuti dua putusan MK itu. Dalam pernyataan sikap itu, ada 27 akademisi dan praktisi yang tergabung di dalam CALS, di antaranya Aan Eko Widiarto, Alviani Sabillah, Auliya Khasanova, Beni Kurnia Illahi, Bivitri Susanti, Charles Simabura, Denny Indrayana, Dhia Al-Uyun, Fadli Ramadhanil, Feri Amsari, Herdiansyah Hamzah dan Herlambang P Wiratman.

Selain itu, Hesti Armiwulan, Idul Risha , Iwan Satriawan, Mirza Satria Buana, Muchamad Ali Safa'at, Muhammad Nur Ramadhan, Pery Rehendra Sucipta, Richo Andi Wibowo, Susi Dwi Harijanti, Taufik Firmanto, Titi Anggraini, Violla Reininda, Warkhatun Najidah, Yance Arizona dan Zainal Arifin Mochtar.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, Rapat Badan Legislasi DPR RI pembahasan RUU Pilkada yang disebut bertentangan dengan putusan MK soal syarat ambang batas pencalonan dalam pilkada berlangsung singkat dan langsung ketok palu.

"Itu hanya 'sat-set sat-set' *ketok* saja, begitu," kata Hasanuddin kepada pers di Kompleks Parlemen.

Menurutnya, ada kejanggalan dalam rapat tersebut karena draf RUU Pilkada yang ditayangkan di layar tak sama dengan draf dokumen yang dicetak dan dibagikan kepada anggota DPR peserta rapat. "Saya ulangi lagi, tadi yang ditayangkan itu tidak sesuai keputusan MK. Begitu dicetak, beda," katanya.

Setelah itu, tambah Hasanuddin, Fraksi PDIP akan menggelar rapat guna membahas hasil rapat Baleg tersebut karena rapat itu tidak memberikan banyak kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangannya.

"Kami akan meneruskan perjuangan untuk tetap kita mendorong agar demokrasi di Indonesia berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Sebelumnya, Baleg DPR RI menyepakati daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi RUU Pilkada terkait batas usia minimum calon kepala daerah untuk maju pilkada merujuk pada putusan Mahkamah Agung yang dihitung sejak pelantikan.

"Setuju *ya* merujuk pada putusan MA, ya? Lanjut?" tanya Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada, kemarin. **(Ant/Obi)-d**

Helena

Sambungan hal 1

pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (21/8).

Menurut JPU, bukti transaksi keuangan tersebut merupakan transaksi pengumpulan biaya pengamanan sewa alat processing untuk penglogaman timah antara Harvey bersama-sama dengan Direktur Utama PT RBT Suparta, Pemilik Manfaat CV Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia Thamron alias Aon, serta Direktur PT Sariwiguna Binasentosa Robert Indarto. Kemudian, bersama-sama pula dengan Pemilik Manfaat PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan, General Manager Operasional PT Tinindo Internusa Rosalina, serta Marketing PT Tinindo Internusa Fandy Lingga.

"Langkah menyembunyikan dan menyamarkan transaksi tersebut dilakukan dengan transaksi penukaran uang dan pengiriman ke rekening Harvey dengan catatan tujuan transaksi sebagai 'setoran modal usaha' atau 'pembayaran utang-piutang'. Padahal senyatanya tidak ada hubungan utang-piutang atau modal usaha antara Helena maupun PT QSE dengan Harvey," ungkapnya.

JPU menambahkan, langkah lainnya yang dilakukan Helena dalam menyembunyikan transaksi korupsi, yakni transaksi tidak didukung dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku. Di antaranya tidak dilengkapi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak ada keterangan untuk transaksi di atas 25 ribu dolar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, transaksi juga tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) maupun Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan tidak dicantumkan dalam laporan keuangan PT QSE atas transaksi penukaran uang yang dilakukan oleh Harvey bersama-sama dengan Suparta, Tamron alias Aon, Robet, Suwito, Fandy, serta Rosalina di PT QSE. **(Ant/Has)-f**

Pemerintah

Sambungan hal 1

Bunyi huruf e dalam pasal tersebut adalah berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota. DPR sepakat syarat usia calon kepala daerah minimal 30 tahun dihitung saat pelantikan pasangan calon, berdasarkan hasil rapat panja revisi UU Pilkada yang menolak untuk mengakomodasi putusan MK.

Menurut dia, meskipun terdapat perbedaan waktu penetapan batas usia calon kepala daerah antara putusan MK dan keputusan MA, Pemerintah memilih untuk tidak berkomentar lebih lanjut tentang detail RUU Pilkada yang sedang dibahas.

Nasbi juga menjelaskan, Pemerintah menghormati hak DPR untuk membentuk UU meskipun ada putusan dari lembaga yudikatif seperti MK dan MA.

"Jadi, saya minta jangan berprasangka macam-macam dahulu. 'Kan sidangnya *live* ya, teman-teman bisa lihat, sidang-sidang di DPR itu apakah kemudian mereka mengakomodasi keputusan lembaga-lembaga tinggi negara tadi atau tidak? Apakah mereka sejalan dengan keputusan lembaga-lembaga negara tadi atau tidak?" katanya.

Jika putusan lembaga-lembaga negara tidak diakomodasi dalam RUU Pilkada, Hasan memperkirakan akan terjadi sengketa aturan. Hasan Nasbi mengajak untuk menghormati hak dari masing-masing pihak yang menerbitkan aturan. Seluruh sengketa akan ditangani melalui kamar yudikatif yang kemudian menjalankan kewenangannya. **(Ant/Obi)-d**

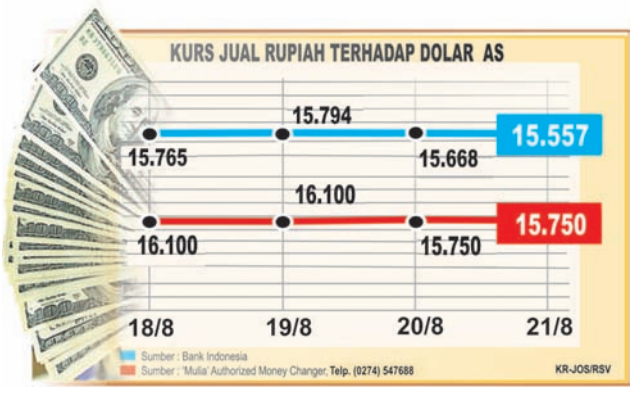

Prakiraan Cuaca — **22 Agustus 2024**

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah · Berawan · Udara Kabur · Hujan Lokal · Hujan Petir

Grafis : Arko

Indahnya Kemerdekaan Republik Indonesia

Dr Ismadiyanti Purwaning Astuti, SE Msc
Prodi Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

BULAN agustus menjadi bulan kemerdekaan karena bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 dimana hari dibacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan dikibarkannya Bendera Merah Putih untuk pertama kali yang berarti pernyataan Indonesia sudah terbebas dari penjajahan. Masyarakat memperingati hari kemerdekaan dengan semangat dan semarak. Masyarakat Indonesia merayakan kemerdekaan dengan cara membuat perlombaan, membuat pertunjukan/ pementasan, pawai dan lain-lain. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat persaudaraan dan persatuan bangsa. Sekarang sudah 79 tahun Indonesia Merdeka, benarkah seluruh rakyat Indonesia sudah merasakan kemerdekaan? Apa makna kemerdekaan yang sesungguhnya?

Merdeka menurut KBBI berarti bebas, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat dan tidak bergantung kepada pihak tertentu. Merdeka dapat juga diartikan sebagai keadaaan bebas tanpa kendali orang, negara atau entitas lain. Kata merdeka secara harfiah diartikan bebas dari belenggu dan tekanan dari penjajah atau pihak tertentu. Kemerdekaan merupakan keadaan dimana suatu bangsa atau negara bebas dari intervensi negara atau bangsa lain. Kemerdekaan juga diartikan sebagai kebebasan dari ketidaksetaraan dan diskriminasi serta menghapus batasan fisik dan mental yang menjadi penghalang. Semangat kemerdekaan sejati menjadi pendorong inklusivitas dan kesetaraan dalam pendidikan, ekonomi, layanan kesehatan, politik dan sosial. Kemerdekaan harus dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia tanpa ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan.

Kemerdekaan menjadi salah satu momentum penting yang mendorong individu atau masyarakat Indonesia untuk meraih potensi terbaiknya. Pada era sekarang ini, kemerdekaan sangat berhubungan dengan inovasi dan kreativitas. Masyarakat yang merdeka merupakan masyarakat yang mampu menghasilkan ide dan gagasan baru tanpa takut akan adanya hambatan. Nilai dan aspek yang harus ditanamkan dalam mengisi kemerdekaan yaitu inklusivitas dan toleransi, semangat inovasi dan kreatifitas, mempunyai pemahaman yang kritis, menjaga warisan sejarah dan bertanggungjawab. Dengan menanamkan nilai tersebut dharapkan kita mampu menghadapi tuntutan zaman sekarang ini yaitu perubahan teknologi yang cepat, perubahan iklim dan krisis Kesehatan. Kemerdekaan yang sekarang kita dapatkan memberikan kebebasan untuk mencari solusi inovatif yang mengikuti perkembangan zaman.

Dimasa penjajahan, cita-cita Bangsa Indonesia adalah untuk merdeka tetapi sekarang cita-cita bangsa adalah untuk menjadi negara yang menjadi poros ekonomi yang kuat. Cita-cita tersebut dapat terwujud apabila generasi muda berani mengambil risiko dan mancoba hal yang baru. Keberanian akan membawa hal positif dan meningkatkan semangat kemerdekaan. Saling toleransi antar sesama juga sangat diperlukan karena Indonesia penuh keberagaman dari suku, budaya, bahasa dan agama. Generasi muda harus mencetak banyak prestasi dengan menghasilkan barang dan jasa unggulan sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri.

Makna kemerdekaan yang sejati di masa sekarang yaitu mampu mengenali tantangan dan peluang dihadapan kita. Kita juga perlu terus menerus menghidupkan semangat perjuangan yang sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Dengan menghargai sejarah, mengatasi tantangan modern, dan berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik, kita baru benar-benar menghormati makna sejati dari kemerdekaan. Kita harus melangkah maju ke masa depan yang lebih berdaya guna, lebih produktif dan lebih merdeka dengan menjaga semangat inklusivitas, inovasi dan tanggung jawab. Merayakan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan baik menjadi wujud rasa syukur kita sebagai Bangsa Indonesia.

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park